



## Research Article

# Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, *Inventory Intensity*, dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia

**Citation:**  
Ramdhani, D., Hasanah, D.N., Pujangga, A.M. & Ahdiat, D. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Inventory Intensity, dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1-16. <https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.1-16>

**Article Process**  
**Submitted:**  
25/01/2022

**Accepted:**  
23/02/2022

**Published:**  
13/04/2022



**Office:**  
Departement of Accounting  
Matana University  
ARA Center, Matana  
University Tower  
Jl. CBD Barat Kav, RT.1,  
Curug Sangereng, Kelapa  
Dua, Tangerang, Banten,  
Indonesia



This is an open access  
article published under the  
CC-BY-SA license.

**Dadan Ramdhani<sup>1\*</sup>, Destri Nur Hasanah<sup>2</sup>, Akbar Maulana Pujangga<sup>3</sup>, Didi Ahdiat<sup>4</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>3</sup>Universitas Pramita Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Cendikia Abditama

\*ddn\_ramdhani@yahoo.com

## ABSTRACT

*This research aims to determine and examine the effect of corporate social responsibility, leverage, inventory intensity, and political connections on tax aggressiveness. The population in this study uses property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. The number of samples obtained is as many as 17 companies for 5 years. The total sample used after going through the purposive sampling technique was 85. The analytical method used was multiple regression analysis using SPSS Statistics 25 software in processing data starting from descriptive statistical tests to hypothesis testing. The results showed that the leverage did simultaneously influence tax aggressiveness. Meanwhile, corporate social responsibility, inventory intensity, and political connection has no effect on tax aggressiveness.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility, Leverage, Inventory Intensity, Political Connection, Tax Aggressiveness.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji serta meneliti pengaruh *corporate social responsibility*, *leverage*, *inventory intensity*, dan koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Jumlah sampel yang diperoleh adalah sebanyak 17 perusahaan selama 5 tahun. Total sampel yang digunakan setelah melalui teknik *purposive sampling* adalah sebanyak 85. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan software SPSS Statistics 25 dalam melakukan pengolahan data yang dimulai dari uji statistik deskriptif hingga uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan variabel *corporate social responsibility*, *inventory intensity*, dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

**Kata Kunci:** *Corporate Social Responsibility, Leverage, Inventory Intensity, Koneksi Politik, Agresivitas Pajak.*

## PENDAHULUAN

Keberadaan suatu perusahaan dapat menjadikan keuntungan bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak (Pratiwi, 2019). Menurut Undang-Undang 20 Tahun 2019 tentang APBN tahun anggaran 2020 menyebutkan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang diperoleh dari negara yang terdiri dari pajak dalam negeri serta pajak perdagangan nasional. Sebenarnya pendapatan negara berasal dari banyak sektor, hanya saja pendapatan negara terbesar berasal dari pembayaran pajak. Dari uraian diatas, pemasukan pajak terhitung sejak 2016 hingga 2020 tidak pernah yang namanya mencapai target bahkan pada tahun 2020 meleset dari target yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur. Bahwa tingginya target pemerintah serta tidak lancarnya penerimaan pajak membuat realisasi penerimaan pajak selalu di bawah yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan adanya penurunan tarif pajak, pemberian intensif pajak yang tidak tepat sasaran, wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak serta wajib pajak yang berupaya melakukan tindakan perencanaan pajak dalam upaya pencapaian beban pajak yang efisien (Pinareswati & Mildawati, 2020).

Menurut (Susanto *et al.*, 2018) agresivitas pajak merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak perusahaan yang dilakukan melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*). Dengan kata lain, jika masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan yang berlaku perusahaan dapat saja melakukan praktik agresivitas pajak dalam bentuk penghindaran pajak. Tetapi, penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal (*tax evasion*) oleh sebuah perusahaan tidak lagi sesuai ketika praktik yang dilakukan bertentangan dengan ruang lingkup peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi seperti reputasi perusahaan yang tercemar dan dikenakan sanksi berupa denda. Maka dari itu, perusahaan memerlukan perencanaan pajak yang agresif untuk dapat menghemat pajaknya, karena semakin besar tindakan penghematan pajak yang dilakukan maka dapat dianggap perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajak (Fadli *et al.*, 2016). Agresivitas pajak dapat diukur dengan skala *Effective Tax Rate* (ETR), dengan ETR yang rendah menunjukkan adanya agresivitas pajak.

Kementrian Keuangan mengumumkan bahwa terdapat enam sektor utama penerimaan pajak di tahun 2020 mengalami kontraksi, salah satu sektor itu adalah sektor *property* dan *real estate* minus sebesar 22,56% *year on year* (yoy). Kemudian pada tahun 2019, terjadi fenomena turunnya kinerja penerimaan pajak pada sektor *property* hingga Oktober 2019. Tercatat turun tipis 0,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp 64,8 triliun atau 6,9 persen dari total penerimaan pajak Nasional. (nasional.kontan.co.id, Berita pada 6 Januari 2021). Kasus tindakan agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia adalah transaksi *property* yang dilakukan oleh pengembang (developer) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yaitu transaksi penjual rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar di Semarang. Namun pada akta notaris penjualan tersebut hanya tertulis sebesar Rp 940 juta. Dapat diartikan terjadi selisih harga yaitu mencapai Rp 6,1 Miliar. Maka dalam transaksi ini, terdapat potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang tidak dibayar sebesar Rp 610 juta dan kekurangan lain yang tidak dibayar yaitu PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar Rp 300 juta. Maka total pajak kurang dibayar developer senilai Rp 910 juta. Dapat disimpulkan dalam kasus ini jika developer Perumahan Bukit Semarang menjual ratusan unit rumah mewah, hal ini menyebabkan kerugian negara jika ribuan rumah dijual dengan cara seperti ini (Awaloedin, 2020).

Faktor yang diduga dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan agresivitas pajak memiliki keterkaitan yang terletak pada tujuan utama perusahaan yaitu mendapatkan laba tinggi tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga semakin besar laba yang diperoleh perusahaan akan semakin besar juga penghasilan kena pajaknya (Goh *et al.*, 2019). Beban pajak dan beban *Corporate Social Responsibility* merupakan anggapan dua beban yang sama yang dimiliki perusahaan untuk kepentingan kesejahteraan

masyarakat. Pajak dan *Corporate Social Responsibility* memiliki keterkaitan yaitu jika pajak adalah tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder*-nya melalui pemerintah, sedangkan *Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab perusahaan kepada semua *stakeholder*-nya tanpa melalui perantara. Seperti dalam penelitian Migang dan Dina, (2020) dan Chen, (2018) yang membuktikan bahwa variabel *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Makhfudloh *et al.*, (2018), Alifa *et al.*, (2020), dan Pinareswati Mildawati, (2020) diketahui bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas.

Faktor lain yang diduga dapat mendorong perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan yaitu kebijakan *leverage*. Seberapa banyaknya kewajiban yang dimiliki suatu perusahaan adalah gambaran tentang *leverage*. Dengan adanya kewajiban yang besar dapat mengakibatkan beban bunga yang muncul dari kewajiban tersebut menjadi besar. Kewajiban perusahaan yang akan memunculkan beban bunga bertindak sebagai pengurang laba sebelum pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi berkurang (Wijaya dan Saebani, 2019). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memiliki kemampuan untuk menghindari pajak melalui transaksi keuangan dengan memperbanyak kewajiban yang berbunga. penelitian terdahulu yang telah dilakukan menurut Muliasari dan Hidayat (2020), Pinareswati dan Mildawati (2020) dan Ratnawati dan Zahira (2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dimana disebutkan dengan *leverage* yang tinggi dapat dikatakan perusahaan memiliki tingkat agresivitas yang tinggi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Goh *et al.*, (2019) dan Wijaya, (2019) dan Romdhon *et al.*, (2018) mengungkapkan *leverage* tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selain itu yang berpotensi sebagai salah satu adanya praktik agresivitas pajak yaitu *inventory intensity*. Intensitas persediaan (*inventory intensity*) menggambarkan bagian harta khususnya seberapa banyak persediaan perusahaan dibandingkan dengan seluruh aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Dengan tingkat intensitas persediaan yang berada di gudang perusahaan dapat berpengaruh terhadap beban pajak yang ditanggung karena munculnya beban-beban akibat dari adanya persediaan (Pinareswati & Mildawati, 2020). Biaya yang akan timbul dan menyebabkan beban pajak bertambah karena numpuknya investasi persediaan di dalam gudang yaitu seperti biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan, administrasi umum, biaya produksi. Beban yang dapat menjadi pengurang pajak penghasilan atau disebut (*deductible expense*) diatur dalam UU No.36 Tahun 2008. Menurut Anggriantari & Purwantini (2020) serta Apriyanti & Arifin (2021) didalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Pinareswati & Mildawati, 2020), (Rosmaria *et al.*, 2021) dan (Hidayat & Fitria, 2018).

Faktor berikutnya Koneksi Politik yang diprediksi dapat mempengaruhi praktik agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan dengan koneksi politik dilakukan dengan menempatkan pihak yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah dengan pihak pemerintah, dengan ini pihak pemerintah akan mempunyai koneksi politik terhadap struktur organisasi perusahaan. Menurut Wicaksono (2017) dengan mempunyai hubungan koneksi politik terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh seperti diberikannya keringanan dalam deteksi pemeriksaan sehingga resiko terdeteksi menjadi rendah, serta politisi ini juga memberikan perlindungan bagi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2017), (Setyastri *et al.*, 2021) menyatakan bahwa penelitian koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rinaldi *et al.*, 2020), (Windaswari & Merkusiwati, 2018) serta penelitian yang dilakukan oleh (Dwi *et al.*, 2021) menyatakan dalam riset mereka adalah koneksi politik tidak berpengaruh dalam agresivitas pajak.

Dari pembahasan diatas, dapat diketahui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan diantaranya *corporate social responsibility*, *leverage*, *inventory intensity* dan koneksi politik. Penelitian ini merupakan bentuk replikasi penelitian (Chen, 2018), dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu *Leverage* dan *Inventory Intensity*.

**Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, *Inventory Intensity*, dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia**

Dadan Ramdhani, Destri Nur Hasanah, Akbar Maulana Pujangga, Didi Ahdiat

---

Selain itu perbedaan terletak pada tahun penelitian dan objek penelitian. Dengan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini. masih layak untuk diteliti. Dengan pemaparan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian ini.

## **STUDI LITERATUR**

### **Teori Agensi**

Alasan penelitian ini menggunakan *agency theory* yaitu karena penelitian ini menggunakan variabel *leverage*, *inventory intensity*, dan koneksi politik. Teori agensi merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep perusahaan, dimana yang diketahui teori ini menjelaskan kesepakatan atau hubungan perusahaan dalam mengelola perusahaan dengan pemerintah demi tercapainya suatu tujuan utama perusahaan yaitu mendapatkan profit yang besar serta membayar pajak yang kecil. Menurut Maulana (2020) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan yang dihasilkan dari adanya kontrak antara pihak tertentu (*principal*) yang membutuhkan pihak lain (*agent*) untuk melakukan layanan dengan cara memberikan wewenang pengambilan keputusan terhadap agent. Konflik yang sering terjadi di dalam keagenan dimana kedua belah pihak memiliki kepentingan motivasi yang berbeda Pihak pemerintah selaku pemilik modal mendelegasikan wewenang kepada manajer untuk mengelola perusahaannya (Pinareswati & Mildawati, 2020). Disini perusahaan atau manajer bertanggung jawab atas keberhasilan operasi perusahaan yang dijalankannya.

Teori agensi akan berusaha memanfaatkan manajemen pajak dan mengelola asetnya sebaik mungkin dengan cara mendapatkan keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan yang dikelola terlihat lebih baik pada *principal*. Sehingga dengan semakin tinggi laba suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar laba suatu perusahaan, semakin besar juga praktik agresivitas pajak yang dilakukan (Firdaus, 2021).

### **Teori Stakeholder**

Alasan penggunaan teori *stakeholder* dalam penelitian ini yaitu karena penelitian menggunakan variabel seperti *corporate social responsibility*. Karena semakin meningkatnya kegiatan lingkungan dan sosial dalam perusahaan serta diungkapkan dalam laporan tahunan yang baik, maka perusahaan akan dipandang baik oleh penggunaan laporan keuangan tahunan maupun *stakeholder*-nya. Dengan pandangan perusahaan yang baik akan menarik perhatian para *stakeholder* ataupun masyarakat pengguna laporan keuangan (Kusmiyatun & Ramdhani, 2009). Menurut (K. Hidayat *et al.*, 2018) teori *stakeholder* adalah teori pemangku kepentingan yang relevan dalam menjelaskan tindakan agresivitas pajak dengan *corporate social responsibility* dimana adanya perluasan tanggung jawab perusahaan atas dasar pemikiran bahwa pencapaian tujuan perusahaan erat kaitannya dengan pola (setting) lingkungan sosial dimana usaha itu berada. Menurut Edward Freeman teori *stakeholder* yaitu teori yang menyatakan jika perusahaan ingin mencapai tujuan perusahaan maka harus memenuhi tanggung jawab sosialnya. Teori ini menjelaskan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan sebagai cara untuk berhubungan dengan *stakeholder*. Perusahaan menerapkan *corporate social responsibility* (tanggung jawab sosial) untuk mempertimbangkan kepentingan pihak yang terdampak tindakan dari perusahaan

### **Agresivitas Pajak**

Menurut Mustika (2017) agresivitas pajak merupakan suatu kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan dengan tujuan untuk menurunkan pendapatan kena pajak baik dengan cara legal yaitu melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun dengan cara ilegal yang dilakukan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dapat dikatakan perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan menjadikan legal, ilegal ataupun keduanya.



### **Corporate Social Responsibility**

*Corporate Social Responsibility* sebagai upaya berkelanjutan pengusaha untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup pekerja dan berkontribusi pada masyarakat secara keseluruhan (Purba, 2021). Menurut Sari (2019) yang mendefinisikan *corporate social responsibility* yaitu suatu komitmen perusahaan dengan memperhatikan tanggung jawab kesejahteraan sosial dan lingkungan masyarakat dan bukan hanya berfokus pada keuntungan saja. Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab perusahaan melakukan pertanggungjawaban social atau kegiatan *corporate social responsibility* untuk membuktikan bahwa perusahaan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam penelitian ini pengukuran *corporate social responsibility* menggunakan indeks GRI versi 4.0 (G4).

### **Leverage**

*Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada jangka pendek maupun jangka panjang dari suatu modal (A. T. Hidayat & Fitria, 2018). Penggunaan kewajiban akan menimbulkan adanya sebuah beban bunga yang harus dibayar. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dalam pasal 6 ayat (1) huruf angka 3 menyebutkan bahwa bunga pinjaman adalah beban yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak untuk tujuan perhitungan perpajakan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak akibat dari insentif pajak atas beban bunga yang diterima perusahaan.

### **Inventory Intensity**

*Inventory intensity* atau disebut dengan intensitas persediaan adalah salah satu komponen penyusunan komposisi aktiva yang diukur dengan membandingkan antar total persediaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Siregar dan Widyawati, 2016). Menurut Firdaus (2020) juga menyebutkan inventasi yang berbentuk persediaan di gudang perusahaan ini akan menimbulkan biaya tambahan seperti biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan sehingga bisa mengurangi laba pada perusahaan. Semakin besar biaya persediaan dan biaya tambahan tersebut menyebabkan manajer dapat melakukan tindakan penghindaran pajak yang agresif.

### **Koneksi Politik**

Koneksi berasal dari bahasa Inggris. Artinya, Koneksi yang didefinisikan sebagai hubungan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan hubungan yang dapat memberikan kenyamanan atau kelancaran dalam segala hal dan aktivitas (Munawaro dan Ramdany, 2019). Menurut Ekaputri (2021) pengertian politik berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti kota. Selain itu, ada istilah lain yaitu Polite yang berarti warga negara, dan “Politicos” yang berarti kewarganegaraan. Menurut Yesianda *et al.*, (2021) mengungkapkan definisi lain bahwa suatu kondisi dimana dewan komisaris, dewan direksi ataupun pemegang saham dari perusahaan adalah orang yang mempunyai hubungan dengan pihak yang terlibat dalam kegiatan politik atau orang yang bekerja juga dalam kegiatan politik suatu negara.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak**

Kinerja perusahaan yang baik dapat mempengaruhi laba perusahaan dan perusahaan yang telah melaksanakan aktivitas *corporate social responsibility* diungkapkan dalam *annual report*. Dalam artian semakin besar perusahaan melakukan aktivitas *corporate social responsibility* maka semakin besar juga pengungkapan *corporate social responsibility* nya, hal ini merujuk juga pada penelitian (Rinaldi *et al.*, 2020). Dengan pelaksanaan aktivitas yang banyak, tentu perusahaan mengeluarkan biaya yang banyak juga dalam bentuk sumbangan. Biaya yang besar tersebut akan menjadi pengurang laba sebelum pajak. Hal tersebut memberikan peluang untuk perusahaan dengan memilih aktivitas *corporate social responsibility* yang termasuk kedalam kategori *deductible expense* guna meminimalisir pajak terutang dan mengoptimalkan pengurangan atas beban-beban dari perhitungan penghasilan kena pajak.

**Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, *Inventory Intensity*, dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia**

*Dadan Ramdhani, Destri Nur Hasanah, Akbar Maulana Pujangga, Didi Ahdiat*

---

Laba perusahaan yang rendah tentu diimbangi dengan beban pajak yang rendah, dimana diungkapkan jika diukur dengan ETR maka ETR yang rendah mengindikasikan tinggi tindakan agresivitas pajak (Zahira & Ratnawati, 2021). Dengan demikian semakin tinggi tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi tingkat tindakan agresivitas pajak karena seolah – olah perusahaan dianggap baik telah memenuhi kewajibannya.

**H<sub>1</sub>: *Corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak**

**Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak**

Perusahaan akan menanggung beban bunga yang besar ketika memiliki kewajiban yang besar dan hal ini menyebabkan beban dapat mengurangi laba perusahaan. Banyak perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif dengan memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi laba. Dikarenakan bunga merupakan sebagai bagian dari biaya usaha yang dapat dikurangkan sebagai biaya atau *tax deductible* (Ekaputri, 2021). Dalam peraturan perpajakan Undang – Undang nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 huruf angka 3 Tentang Pajak Penghasilan, dijelaskan bahwa bunga adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa biaya bunga dapat mengurangi besarnya beban pajak yang terutang dari *leverage*.

**H<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak**

**Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak**

Intensitas persediaan atau *inventory intensity* merupakan strategi yang dilakukan perusahaan dalam menginvestasikan dana dalam bentuk persediaan (A. T. Hidayat & Fitria, 2018). Besarnya jumlah persediaan yang perusahaan miliki akan berdampak pada munculnya beban-beban yang akan mengurangi laba. Jika laba perusahaan menurun dengan intensitas persediaan yang tinggi perusahaan akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang diterima (Andari & Sukarta, 2017). dimana diatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban. Biaya tersebut meliputi biaya penyimpanan, biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan, biaya produksi, biaya administrasi umum, biaya bahan dan biaya penjualan. Biaya tersebut dianggap sebagai beban diluar persediaan (Adisamartha & Noviani, 2015). Menurut Mulyani (2017) mengemukakan beban tersebut akan mengurangi laba bersih, jika laba perusahaan menurun dapat mengindikasikan meningkatnya tindakan agresivitas pajak

**H<sub>3</sub>: *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak**

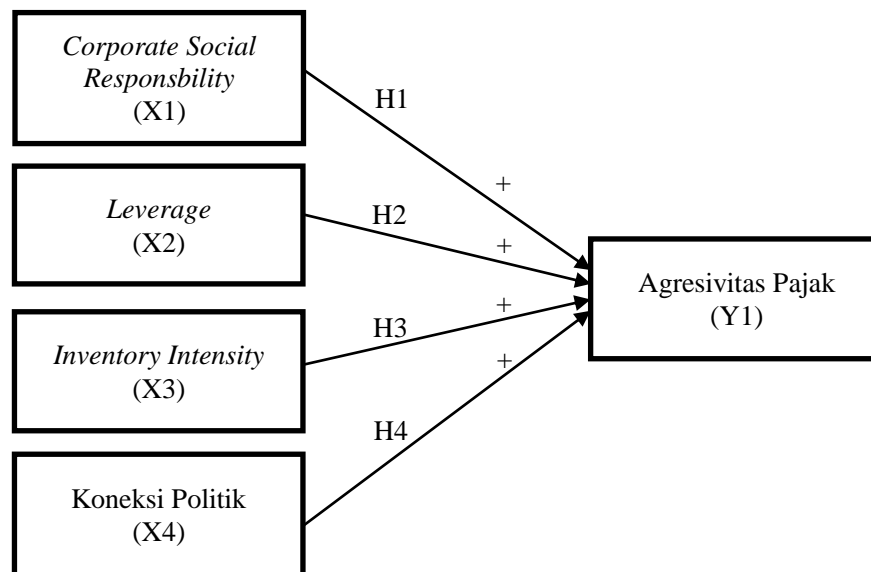
**Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak**

Sebuah perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mempermudah perusahaan itu sendiri dalam memperoleh informasi, yaitu seperti resiko pemeriksaan pajak yang rendah dan kemudahan memperoleh pinjaman modal. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan dijelaskan oleh (Alifa *et al.*, 2018) adalah sebagai motivasi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Karena koneksi politik dapat memberi manfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat. Sehingga semakin banyak perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah maka akan besar peluang untuk melakukan perencanaan pajak sehingga berdampak pada menurunnya transparansi dalam laporan keuangan (Putra, 2019).

Menurut Prasetyo (2020) mengungkapkan perusahaan lebih agresif dalam pajak dan memanfaatkan hubungan untuk kepentingan yang ilegal saat menjalin hubungan politik, karena perusahaan tersebut akan mendapatkan beberapa manfaat yang diperoleh seperti memudahkan dalam mendapatkan pinjaman serta modal, beresiko lebih kecil saat pengecekan, mendapat perlindungan dari pihak berkuasa, terhindar dari pajak serta denda pajak, dan informasi yang didapat lebih baik dalam perubahan regulasi perpajakan di masa depan. Dengan rendahnya resiko pengecekan maka dari itu perusahaan berani melakukan penghindaran pajak.

**H<sub>4</sub> : Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak**

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Penelitian  
Sumber: Chen (2018), Pinareswati & Mildawati (2020)

## METODE

**Populasi dan Sampel.** Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2020. Teknik untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan Purposive Sampling, yaitu membuat kriteria tertentu terhadap populasi agar sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020.
- 2) Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan selama tahun 2016-2020.
- 3) Perusahaan yang mengalami laba atau saldo laba positif selama tahun 2016-2020.
- 4) Perusahaan yang memiliki data terkait variabel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 17 sampel perusahaan, dimana periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 tahun sehingga jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak  $17 \times 5 = 85$  data. Berikut ringkasan dari jumlah – jumlah perusahaan yang tidak memenuhi kriteria di atas disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Eliminasi Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang Terdaftar di BEI tahun 2016-2020	54
2	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang tidak mempublikasikan laporan tahunan selama tahun 2016-2020	(4)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 2016-2020	(27)
4	Perusahaan yang tidak memiliki data terkait variabel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya	(6)
Total sampel selama periode penelitian		17
Total sampel selama 5 tahun		85

**Variabel Dependen (Y).** Variabel dependen yaitu variabel terikat yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah

**Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, *Inventory Intensity*, dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia**

Dadan Ramdhani, Destri Nur Hasanah, Akbar Maulana Pujangga, Didi Ahdiat

---

agresivitas pajak. Penelitian ini dalam mengukur agresivitas pajak menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Perhitungan presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung perusahaan dengan cara membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak (Lanis dan Richardson, 2012).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan} \times 100\%}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

**Variabel Independen (X).** Variabel independen yaitu variabel bebas yang mempengaruhi atau menjadi sebab akibat variabel dependen. Pada penelitian ini, peneliti memakai 4 variabel independen, yaitu :

***Corporate Social Responsibility.*** *Corporate Social Responsibility* diukur berdasarkan GRI VERSI 4 dengan enam indikator kinerja yaitu ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial masyarakat, dan tanggung jawab produk. Maka untuk pengukuran pengungkapan *corporate social responsibility* menggunakan rumus yaitu (Sari, 2019) :

$$CSRI_i = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

Keterangan :

CSRI<sub>i</sub> : Indeks luas pengungkapan *corporate social responsibility*

$\sum X_{yi}$  : Jumlah (nilai 1 = jika item y diungkapkan, 0 = jika item y tidak diungkapkan)

y : Item diharapkan diungkapkan

n<sub>i</sub> : Jumlah item untuk perusahaan I, n<sub>i</sub> ≤ 91

***Leverage.*** *Debt to asset ratio* adalah salah satu suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang perusahaan. (Goh *et al.*, 2019) mengungkapkan *Debt to asset ratio* diukur dengan membagi total kewajiban dengan total aset.

$$DAR = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

***Inventory Intensity.*** Untuk mengukur rasio intensitas persediaan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Inventory Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

**Koneksi Politik.** Menurut (Rinaldi *et al.*, 2020) perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan pemerintah ataupun politisi dinamakan adanya koneksi politik. Menurut Prasetyo (2020) Terdapat kriteria-kriteria perusahaan yang dapat dikatakan mempunyai hubungan politik diantaranya yaitu :

- 1) Jika direktur, dewan komisaris, dewan direksi, dan pemegang saham mempunyai hubungan kedekatan keluarga atau kerabat dengan pejabat institusi negara, anggota militer, ataupun politisi.
- 2) Jika salah satu pemegang saham setidaknya 10% merupakan pejabat atau pernah menjabat dalam salah satu institusi pemerintah, anggota militer, atau politisi.
- 3) Jika direktur atau salah satu dewan direksi dan dewan komisaris merupakan pejabat atau pernah menjabat disalah satu institusi pemerintah, anggota militer, atau politisi.

Pengukuran yang digunakan untuk perusahaan yang memiliki dan memenuhi kriteria koneksi politik dapat diukur dengan variabel *dummy*. Untuk pengukuran variabel *dummy* perusahaan yang memiliki salah satu dari ketiga kriteria koneksi politik maka diberikan nilai 1, dan jika tidak memiliki kriteria koneksi politik maka diberikan nilai 0 (Chen, 2018).

**Teknik Analisis Data**

Ada beberapa tahapan dalam penelitian ini, yang pertama adalah menggunakan statistik deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis data yang



menghasilkan deskripsi yang terkumpul mengenai data yang telah dilakukan pengujian. Pengujian melalui deskriptif statistik memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum (Sugiyono, 2016). Selanjutnya juga dilakukan uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi dalam penelitian ini. Dimana jika asumsi klasik tersebut tidak terpenuhi akan menyebabkan bias pada hasil penelitian. Uji asumsi klasik yang dilakukan ada 4 yaitu, uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedesitas, dan uji autokorelasi.

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis untuk menguji ada atau tidaknya keterkaitan antar pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, dimana dalam hal ini terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji F dan uji T. Adapun rumus analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Dimana :

Y : Agresivitas Pajak  
 $\alpha$  : Konstanta  
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  : Koefisien Regresi  
 $X_1$  : *Corporate Social Responsibility*  
 $X_2$  : *Leverage*  
 $X_3$  : *Inventory Intensity*  
 $X_4$  : Koneksi Politik  
 $\varepsilon$  : Error

## HASIL

**Uji Normalitas.** Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel 2 dapat dilihat bahwa menunjukkan hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* yaitu besarnya nilai Asymp.Sig adalah 0,200. Nilai perolehan tersebut > 0,05 maka data dikatakan bahwa pada model regresi terdistribusi secara normal.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,63757355
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,083
	Negative	-,070
Test Statistic		,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

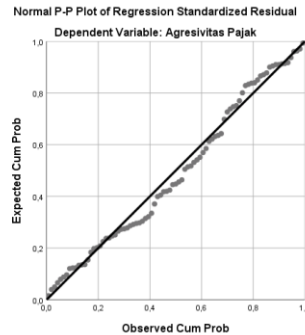
Selain melalui uji *Kolmogorov-Smirnov*, uji normalitas dapat dideteksi juga dengan melihat gambar normal P-Plot dan gambar histogram pada Gambar 1 di bawah ini. Adapun gambar 1 yang disajikan grafik uji normalitas melalui *Normal Probability Plot* hasil menunjukkan penyebaran titik-titik plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan

**Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, *Inventory Intensity*, dan *Koneksi Politik* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia**

*Dadan Ramdhani, Destri Nur Hasanah, Akbar Maulana Pujangga, Didi Ahdiat*

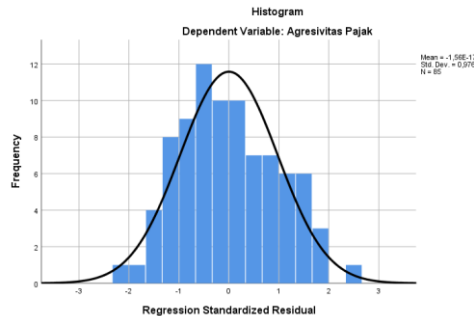
bahwa data dalam penelitian ini sudah terdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas P-Plot



Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Histogram



Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan hasil grafik histogram yang disajikan pada gambar 2 di atas menunjukkan gambar pola tepat ditengah seperti berbentuk lonceng dan tidak menceng ke kanan dan kiri.

**Uji Multikolinearitas.** Dasar pengukurannya adalah jika nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10 maka model regresi dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penelitian ini tidak terdapat gejala multikolonieritas , karena semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih lebih dari 10. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas yang disajikan dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients			Toleranc e	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-2,669	,455		-5,860	,000		
	CSR	1,299	1,640	,077	,792	,431	,955	1,047
	Leverage	1,971	,365	,532	5,397	,000	,930	1,075
	Inventory Intensity	-,103	,440	-,022	-,233	,816	,978	1,022
	Koneksi Politik	-,242	,150	-,161	-1,608	,112	,898	1,114

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

**Uji Heterokedesitas.** Uji heterokedesitas dideteksi menggunakan uji glejser dan uji *scatterplot*. Berikut hasil uji heterokedesitas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini :

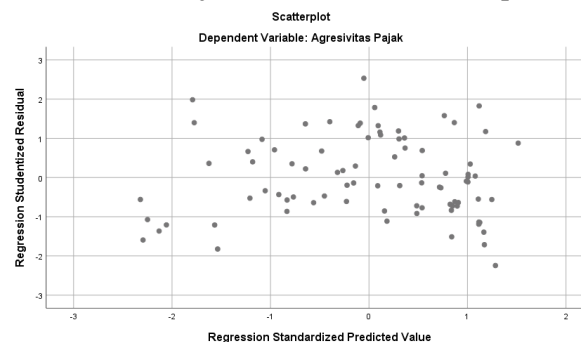
Tabel 4 Hasil Uji Heterokedesitas

		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,875	,242		3,612	,001
	CSR	-1,173	,873	-,147	-1,344	,183
	Leverage	-,083	,194	-,047	-,427	,671
	Inventory Intensity	-,368	,234	-,170	-1,571	,120
	Koneksi Politik	,123	,080	,174	1,538	,128

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Gambar 3 Uji Heterokedesitas Scatterplot



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan uji gletjser hasil uji heterokedesitas menunjukkan hasil signifikansi masing-masing dari variabel independen adalah lebih besar dari 0,05 dan uji heterokedesitas melalui *scatterplot* menunjukkan tidak terdapat masalah heterokedesitas pada model regresi karena gambar *scatterplot* menyebar titik-titiknya.

**Uji Autokorelasi.** Uji Autokorelasi dilakukan dengan menghitung nilai Durbin-Watson untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya gejala autokorelasi. Hasil uji autokorelasi menggunakan alat uji Durbin-Watson disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,526 <sup>a</sup>	,277	,241	,6533219	1,806

a. Predictors: (Constant), Koneksi Politik, Inventory Intensity, CSR, Leverage

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi autokorelasi, karena berdasarkan hasil perhitungan tersebut  $1,7470 < 1,806 < 2,253$  atau nilai Durbin Watson (DW) terletak diantara nilai “ $dU < DW < 4 - dU$ ”.

## Uji Hipotesis

**Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Leverage, Inventory Intensity*, dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia**

*Dadan Ramdhani, Destri Nur Hasanah, Akbar Maulana Pujangga, Didi Ahdiat*

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,669	,455		-5,859	,000
	CSR	1,299	1,641	,077	,792	,431
	Leverage	1,971	,365	,532	5,397	,000
	Inventory Intensity	-,103	,440	-,022	-,233	,816
	Koneksi Politik	-,242	,150	-,161	-1,608	,112

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji regresi linier pada tabel 6 maka diperoleh persamaan regresi berikut:

$$Y = -2,669 + 1,299X_1 + 1,971X_2 - 0,103X_3 - 0,242X_4 + \varepsilon$$

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2016) nilai koefisien determinasi dinyatakan antara 0 (nol) dan 1 (satu). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,526 <sup>a</sup>	,277	,241	,6533153

a. Predictors: (Constant), Koneksi Politik, Inventory Intensity, CSR, Leverage

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang terdapat pada tabel 7 menunjukkan hasil nilai *adjusted R square* sebesar 0,241. Nilai *adjust R square* tersebut menunjukkan arti bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu *corpoarte social responsibility, leverage, inventory intensity*, dan koneksi politik memiliki pengaruh sebesar 24,1%. Sedangkan nilai sisanya yaitu sebesar 75,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu selain variabel independen yang diuji dalam model regresi.

**Uji Kelayakan Model (Uji F).** Uji F memiliki nilai kriteria dengan nilai signifikasi sebesar 5% ( $\alpha=0,05$ ). Maka apabila nilai dari variabel independen  $<0,05$ , artinya model penelitian dapat dikatakan layak.

Tabel 8 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13,074	4	3,268	7,657	,000 <sup>b</sup>
	Residual	34,146	80	,427		
	Total	47,220	84			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

b. Predictors: (Constant), Koneksi Politik, Inventory Intensity, CSR, Leverage

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai sig 0,000  $< 0,05$  dan dengan nilai Fhitung sebesar 7,657  $>$  Ftabel 2,49. Sehingga dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel independen secara

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dan dikategorikan baik dan lulus uji *goodness of fit*.

**Uji Parsial (Uji t).** Jika nilai signifikansi variabel independen  $< 0,05$  maka variabel tersebut dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dan hipotesis dapat diterima.

Tabel 9 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-2,669	,455		
	CSR	1,299	1,641	,077	,792
	Leverage	1,971	,365	,532	,000
	Inventory Intensity	-,103	,440	-,022	,816
	Koneksi Politik	-,242	,150	-,161	,112

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

## PEMBAHASAN

**Pengaruh *Corporate social responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.** Hasil nilai signifikansi untuk variabel *corporate social responsibility* sebesar  $0,431 > 0,05$ . Dengan nilai  $\alpha=5\%$  ( $0,05$ ),  $df = n-k$  ( $85-4$ ) maka diperoleh ttabel sebesar  $1,98969$ . Kemudian nilai thitung sebesar  $0,792$ . Nilai tersebut  $< ttabel$   $1,98969$ . Sehingga dapat disimpulkan variabel *corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Artinya dengan perusahaan melakukan kegiatan *corporate social responsibility* dengan tinggi maka semakin rendah agresivitas pajaknya. Seperti halnya yang dijelaskan oleh (Pinareswati & Mildawati, 2020) besar atau kecilnya nilai sebuah pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan tidak akan mempengaruhi agresivitas pajak suatu perusahaan tersebut. Maka dengan semakin tingginya *corporate social responsibility* maka sikap dan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan akan semakin tinggi dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Perusahaan mengeluarkan biaya dengan tujuan baik digunakan untuk melaksanakan tanggung jawabnya bukan menggunakan biaya tersebut sebagai pengurang beban pajak (Rinaldi *et.al*, 2020).

**Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak.** Hasil nilai signifikansi untuk variabel *leverage* sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan nilai  $\alpha=5\%$  ( $0,05$ ),  $df = n-k$  ( $85-4$ ) maka diperoleh ttabel sebesar  $1,98969$ . Kemudian nilai thitung sebesar  $5,397$ . Nilai tersebut  $> ttabel$   $1,98969$ . Sehingga dapat disimpulkan variabel *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat total hutang yang tinggi maka diartikan tingkat agresivitas pajaknya juga akan tinggi (Purwanto dan Agus, 2016). Tingkat hutang perusahaan akan mempengaruhi besarnya beban bunga yang ditanggung perusahaan karena peminjaman dana kepada pihak ketiga. Dengan tingkat hutang yang tinggi dan menimbulkan beban bunga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak atau menghemat pajaknya. Oleh karena itu, menunjukan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung melakukan tindakan pajak yang agresif akibat dari insentif pajak atas beban bunga yang diterima perusahaan untuk mengecilkan beban pajaknya

**Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak.** Hasil nilai signifikansi untuk variabel *inventory intensity* sebesar  $0,816 > 0,05$ . Dengan nilai  $\alpha=5\%$  ( $0,05$ ),  $df = n-k$  ( $85-4$ ) maka diperoleh ttabel sebesar  $1,98969$ . Kemudian nilai thitung sebesar  $-0,233$ . Nilai tersebut  $< ttabel$   $1,98969$ . Sehingga dapat disimpulkan variabel *inventory intensity* tidak memiliki pengaruh yang



**Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, *Inventory Intensity*, dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia**

*Dadan Ramdhani, Destri Nur Hasanah, Akbar Maulana Pujangga, Didi Ahdiat*

---

signifikan terhadap agresivitas pajak. Ternyata berapapun banyaknya tingkat persediaan yang perusahaan miliki tidak mempengaruhi praktik tindakan agresivitas pajak. Data sampel perusahaan menunjukkan perusahaan lebih menginvestasikan modal yang dimiliki pada aset tetap dibandingkan dengan persediaan. Seperti halnya dalam penelitian Pinareswati dan Mildawati (2020) *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena diakibatkan intensitas persediaan yang perusahaan digunakan bukan untuk melakukan tindakan pajak yang agresif melainkan digunakan oleh perusahaan untuk menentukan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang nantinya digunakan sebagai acuan menentukan harga jual produk suatu perusahaan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan Hidayat dan Fitria (2018) menjelaskan juga bahwa investasi dalam bentuk persediaan tidak tepat dilakukan karena tidak memberikan dampak apapun terhadap tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Biaya yang muncul akibat penumpukan persediaan mungkin bukan sesuatu yang ingin dikeluarkan oleh perusahaan karena berkaitan dengan kualitas persediaan yang ada.

**Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak.** Hasil nilai signifikansi untuk variabel koneksi politik sebesar  $0,112 > 0,05$ . Dengan nilai  $\alpha=5\%$  (0,05),  $df= n-k$  (85-4) maka diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,98969. Kemudian nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,608. Nilai tersebut  $< t_{tabel}$  1,98969. Sehingga dapat disimpulkan variabel koneksi politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Kedekatan yang terjalin antara perusahaan dengan pemerintah menjadikan perusahaan tersebut lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan kebijakan serta keputusan karena ketatnya pengawasan. Pimpinan perusahaan yang memiliki afiliasi dan rangkap jabatan sebagai anggota pemerintah ataupun saham perusahaan dimiliki oleh pemerintah maka dari itu perusahaan tentu mendapatkan kepercayaan bahwa perusahaan yang sedang dijalankan tetap mematuhi peraturan pajak yang ada (Ekaputri, 2021). Dalam mengambil keputusan dan kebijakan maka perusahaan akan lebih berfikir dalam bertindak, dikarenakan adanya kedekatan yang terjalin antara perusahaan dengan pemerintah (Lestari dan Putri, 2017). Perusahaan juga akan berusaha patuh membayar pajak yang sesuai kepada pemerintah untuk memberikan kontribusi kepada negara. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan terus mendapatkan penghargaan serta citra yang baik dimata pemerintah maupun masyarakat, maka dari itu perusahaan dengan seharusnya tetap mematuhi peraturan perpajakan yang ada.

### KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis dan uji hipotesis pada 17 perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode dari tahun 2016 sampai 2020, maka diperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan *corporate social responsibility*, *inventory intensity*, dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu (1) penelitian ini hanya memiliki nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,241 atau 24,1%. Hal ini diartikan variabel independen yang diteliti hanya mampu memberikan gambaran pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 24,1% saja. Sedangkan sisanya sebesar 75,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dari simpulan tersebut diatas, disarankan Bagi pemerintah dalam peranannya melalui Direktorat Jenderal Pajak diharapkan meningkatkan pengawasan atau *monitoring* terhadap kegiatan perusahaan dalam menentukan kebijakan serta memperhatikan perusahaan yang melaporkan kewajiban perpajakannya agar tidak melakukan tindakan agresivitas pajak dengan memanfaatkan celah peraturan pajak, Bagi para calon investor maupun investor disarankan harus lebih memperhatikan lagi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan melalui berbagai cara di luar variabel penelitian ini, dan Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah sampel yang dijadikan bahan penelitian dengan mengambil sektor lain yang berbeda maupun periode waktu yang lebih lama dalam penelitian. Selain itu peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain selain variabel yang sudah dilakukan pengujian, karena masih banyak terdapat faktor lain penyebab terjadinya

tindakan agresivitas pajak seperti *capital intensity*, profitabilitas, komite audit, dan variabel lainnya.

#### REFERENSI

- Alifa, A. R., Simulingga, N. F., SiBarani, R. O., Wahyu, & Suropto. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal Dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak. PROSIDING WEBINAR NASIONAL "Covid-19 Pandemic and Current Issue in Accounting Research," 104–117.
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage pada Penghindaran Pajak. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 137–153.
- Apriyanti, H. W., & Arifin, M. (2021). Tax aggressiveness determinants. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(1), 27–52.
- Awaloedin, D. T., (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi, Universitas Nasional, Jakarta.
- Chen, X. (2018). Corporate Social Responsibility Disclosure, Political Connection and Tax Aggressiveness: Evidence from China's Capital Markets. *Open Journal of Business and Management*, 6(1), 151–164.
- Effendi, B. (2021). Urgensi Pemilihan Auditor Eksternal: Antara Relevansi Leverage dan Biaya Audit Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 29–42.
- Ekaputri, Aulia. K., (2021) Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Koneksi Politik, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.
- Fadli, I., Ratnawati, V., & Kurnia, P. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011–2013). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1205–1219.
- Firdaus, Farhan. M., (2020). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goh, T. S., Nainggolan, J., & Sagala, E. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Kauntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2012), 83–96.
- Harjito, Y., Sari, C. N., & Yulianto, -. (2017). Tax Aggressiveness Seen From Company Characteristics and Corporate Social Responsibility. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 5(2), 77.
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis*, 13(2), 157–168.
- Kusmiyatun, & Ramdhani, D. (2009). Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Corporate Social Responsibility dan Kinerja Finansial. Universitas Airlangga, 111–135.
- Makhfudloh, F., Herawati, N., & Wulandari, A. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 48.
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 13–20.
- Migang, S., & Dina, W. R. (2020). Pengaruh Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015–2018). *Jurnal Geo Ekonomi*, 11(1), 42–55.
- Pinareswati, S. D., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Pengungkapan Csr, Capital Intensity, Leverage, Profitabilitas, Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(9), 1–23.
- Pratiwi, Annatasya. (2019). Pengaruh Tanggung Jawab Social, Dimensi-dimensinya, dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak, 8(1), 1.
- Purba, Clara. A., (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.

**Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, *Inventory Intensity*, dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia**

*Dadan Ramdhani, Destri Nur Hasanah, Akbar Maulana Pujangga, Didi Ahdiat*

---

- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap tax avoidance (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1625-1642.
- Purwanto, Agus, 2016, Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan, *JOM Fekon*, 3(1).
- Rinaldi, M., Respati, N. W., & Fatimah, F. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Political Connection, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Aggressiveness. *Simak*, 18(02), 149–171.
- Romdhon, M., Kartiko, E., & Nurjamilah, S. (2018). Pengaruh Firm Size dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 20(2), 47-57.
- Rosmaria, J., Chek, D., & Roshaiza, T. (2021). Determinants of Tax Aggressiveness: Empirical Evidence from Malaysia. *Journal of Asian Finance*, 8(5), 179–188.
- Sari, S. W. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). *PROSIDING SENDU Universitas Pasundan*, 38–45.
- Setyastri, N. L. P., Subekti, I., & Prastiwi, A. (2021). Corporate governance and political connection towards the tax aggressiveness of manufacturing companies in Indonesia. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(1), 102–109.
- Susanto, L., Yanti, Y., & Viriany, V. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi*, 23(1), 10–19.
- UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1)
- UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1)
- Windaswari, K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 23, 1980-2008.
- Yesianda, Y. A. P., Surbakti, L. P., & Pita, R. H. D. (2021). Pengaruh Political Connection Terhadap Tax Aggressiveness Dengan Komite Audit Expertise Sebagai Moderator. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 2021–2412.
- Yustin, A. L., & Effendi, B. (2021). Penggunaan Corporate Social Responsibility Sebagai Intervening: Antara Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 75-84.
- <https://cita.or.id/penerimaan-pajak-properti-turun-tipis-01-persen/> (Diakses pada 15 September 2021)
- <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sepanjang-2020-penerimaan-pajak-minus-197> (Diakses pada 5 Oktober 2021)